

**ANALISIS LOCATION QUOTIENT DAN SHIFT SHARE DALAM PENENTUAN  
SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PENYANGGA  
(Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo Dan Karanganyar)**

**Ecclisia Sulistyowati<sup>1</sup>, Tri Wisudawati<sup>2</sup>, Wahyu Adhi Saputro<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universtas Duta Bangsa Surakarta  
email: [ecclisia\\_sulistyowati@udb.ac.id](mailto:ecclisia_sulistyowati@udb.ac.id)

<sup>2,3</sup>Fakultas Sains dan Teknologi, Universtas Duta Bangsa Surakarta  
email: [triwisudawati@gmail.com](mailto:triwisudawati@gmail.com)  
email: [wahyuadhi@udb.ac.id](mailto:wahyuadhi@udb.ac.id)

**ABSTRACT**

*Indicators of increasing economic development can be viewed through the numbers or values of economic growth. Indicators of the regional economy can also be seen from per capita income, economic growth and economic structure. Economic movements do not only occur in big cities but also occur in the supporting districts of the city, for example Karanganyar Regency and Sukoharjo Regency which are buffer districts from the existence of Surakarta City. The purpose of this study was to determine the leading sector of the economy of the buffer district. The data used in this study is secondary data in the form of time series sourced from the Central Statistics Agency for each area of Karanganyar and Sukoharjo Regencies. The data used are regional gross domestic product (GRDP) data for each region from 2016 to 2020. The data analysis used in this study is the analysis of location quotient (LQ) and shift share. Based on the results of the study, it is known that there are basic sectors found in two buffer districts, namely Karanganyar Regency and Sukoharjo Regency. The results of the study based on LQ analysis stated that there were 7 base sectors in the Karanganyar Regency area while in the Sukoharjo Regency area there were 9 base sectors. If you look at the shift share analysis with indicators on the assessment of the component of regional share growth in Karanganyar Regency, there are 7 sectors that have positive values while in Sukoharjo Regency there are only 4 sectors that are still negative..*

*Keywords: Economy, LQ, Buffer District, Shift Share, Sector*

**ABSTRAK**

Indikator dari adanya pembangunan ekonomi yang meningkat dapat ditinjau melalui angka atau nilai pertumbuhan ekonomi. Indikator dari perekonomian daerah juga dapat dilihat dari pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Pergerakan ekonomi tidak hanya terjadi pada kota-kota besar namun juga terjadi pada kabupaten penyangga kota tersebut misalnya Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo yang merupakan kabupaten penyangga dari adanya Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor unggulan perekonomian kabupaten penyangga. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk time series bersumber pada Badan Pusat Statistik masing-masing daerah Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo. Data yang digunakan merupakan data produk domestik regional bruto (PDRB) masing-masing daerah tahun 2016 hingga tahun 2020. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *location quotient* (LQ) dan *shift share*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat sektor basis yang terdapat pada dua daerah kabupaten penyangga yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian berdasarkan analisis LQ meyakini bahwa terdapat 7 sektor basis pada daerah Kabupaten Karanganyar sedangkan pada daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat 9 sektor basis. Jika melihat analisis shift share dengan indikator pada penilaian komponen pertumbuhan pangsa wilayah pada Kabupaten Karanganyar terdapat 7 sektor yang bernilai positif sedangkan pada Kabupaten Sukoharjo hanya terdapat 4 sektor yang masih bernilai negatif.

Kata kunci: Ekonomi, LQ, Kabupaten Peyangga, Shift Share, Sektor

## 1. Pendahuluan

Pembangunan nasional adalah keseluruhan pembangunan yang dilakukan daerah tentunya didasarkan pada prinsip otonomi daerah. Daerah yang memiliki sumber daya tentunya akan membantu daerah tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta secara langsung akan meningkatkan kinerja daerah tersebut. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk peningkatan pelayanan terhadap public serta mengembangkan perekonomian daerah. Terdapat misi utama dari otonomi daerah seperti menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola sumber daya contohnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan begitu masyarakat secara luas akan merasakan manfaat dari kondisi tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang baik pada suatu wilayah menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi wilayah tersebut berjalan. Perlunya dilakukan analisis pertumbuhan ekonomi wilayah untuk melihat keberhasilan pembangunan serta menentukan kebijakan di masa mendatang (Kurniawan, 2016).

Indikator dari adanya pembangunan ekonomi yang meningkat dapat ditinjau melalui angka atau nilai pertumbuhan ekonomi. Indikator dari perekonomian daerah juga dapat dilihat dari pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Nilai tambah dari masing-masing sektor akan mendongkrak struktur ekonomi dengan gambaran besarnya ketergantungan daerah terhadap produksi di tiap sektor tersebut (Usman, 2015). Pada dasarnya faktor penting dalam mengukur pembangunan ekonomi wilayah tertentu ditentukan dari nilai pertumbuhan ekonomi. Angka yang mewujudkan sebagai simbol tersebut adalah nilai PDRB yang notabeneanya adalah persentase dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tercapainya pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pentingnya pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu perlu adanya analisis untuk mengetahui sektor andalan atau sektor basis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut (Hajeri dkk, 2015).

Upaya pembangunan ekonomi tidak semata-mata hanya berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi saja namun juga harus mampu mentiadakan maupun meminimalkan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran serta pengadaan lapangan pekerjaan bagi penduduk wilayah tersebut. Dengan adanya kesempatan kerja maka masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan adanya pendapatan (Todaro dan Smith, 2011). Ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dalam pembangunan ekonomi beberapa sektor. Revolusi industri 4.0 yang ada memicu adanya disparitas income perkapita yang terkadang meningkat dengan derastis dan tajam (5).

Era otonomi daerah memmbuat pembangunan daerah sangat kompleks dan memungkinkan adanya kesenjangan terhadap beberapa daerah tertentu. Akibat dari kondisi tersebut menjadikan adanya persaingan antar daerah yang sangat ketat. Arah terhadap keadaan yang lebih baik bagi masyarakat indentik dengan syarat kesejahteraan. Maksud dari hal tersebut tidak hanya kesejahteraan sosial saja namun juga harus terorganisir dari semua aspek kesejahteraan yang nantinya dapat membantu masyarakat untuk mencapai standar hidup yang sejahtera dan menuju arah yang lebih maju dan baik (Nurohman dkk, 2019). Dorongan tersebut membuat daerah harus meningkatkan daya saing wilayah tersebut dengan maksud dan tujuan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Penentu pertumbuhan ekonomi daerah akan berhubungan dengan permintaan terhadap barang dan jasa dari luar wilayah tersebut. Pengembangan sumberdaya lokal seperti tenaga kerja, bahan baku ekspor kana mendorong pertumbuhan industri dengan menciptakan peluang kerja dan menghasilkan kekayaan daerah. Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Tamura et al., 2019). Potensi keunggulan daerah pasti ada dan dapat dijadikamn sumber pertumbuhan wilayah. Pemerintah harus jeli dalam melihat potensi keunggulan dan memberikan fasilitas penunjang. Berkembangnya potensi unggulan daerah diharapkan untuk meningkatkan

produktivitas ekonomi daerah. Dengan perkembangan sektor yang dipilih untuk mendapatkan prioritas yang baik, sehingga investasi yang dilakukan pada sektor tersebut dapat memberikan multiplier effect yang tinggi terhadap perekonomian di wilayahnya (Sari, 2018)

Setiap daerah pasti mempunyai potensi unggulan yang tentunya tidak harus sama dengan daerah lainnya. Hal tersebut terkait dengan karakteristik wilayah tersebut sehingga penentuan kebijakan dan tujuan pembangunan daerah harus dioptimalkan dan dicocokkan dengan wilayah yang akan dibangun. Dengan begitu prioritas pembangunan daerah akan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut (Mubarak, 2019). Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Jawa dengan jumlah kabupaten terbanyak kedua setelah Jawa Timur yaitu dengan 29 kabupaten dan 6 kota. Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 0,78%. Kondisi demikian membuat Jawa Tengah sebagai provinsi dengan komposisi geografi yang luas yang berdampak pada perekonomiannya. Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Jawa Tengah cukup penting untuk menunjang perekonomian di Indonesia (Rini, dan Khoirudin, 2020). Salah satu kota yang berkembang di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta. Daerah ini diapit oleh beberapa kabupaten penyangga seperti Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Kondisi kabupaten penyangga ini yang berbatasan langsung dengan kota Surakarta seharusnya memiliki peluang yang baik dalam pembangunan ekonomi walaupun nampaknya pertumbuhan ekonomi di kabupaten penyangga ini tidak sebaik di pusat kota wilayah tersebut. Berdasarkan alasan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan apa saja yang dimiliki oleh Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

## **2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan hipotesis**

Pada negara berkembang pembangunan lebih menekankan pada segi ekonomi. Hal tersebut dikarenakan masalah ekonomi yang masih mengalami keterbelakangan daripada

negara maju. Pembangunan bidang ekonomi nantinya diharapkan dapat menunjang tujuan dan dorongan terhadap perubahan bidang atau sektor lainnya (Hajeri dkk, 2015). Potensi daerah seperti sumberdaya manusia, kelembagaan serta sumberdaya fisik lokal daerah dapat dimaksimalkan dengan baik. Arah dari orientasi kebijakan akan bertumpu pada pengambilan inisiatif daerah dalam membangun dan menciptakan kesempatan kerja dengan tujuan meicu peningkatan ekonomi. Sektor unggulan dapat dilihat pada beberapa parameter seperti Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi, sektor yang mempunyai multiplier effect yang tinggi, serta memiliki potensi added value yang cukup baik (Sapriadi dan Hasbiullah, 2015).

Teori perubahan struktural berpusat pada transformasi struktur ekonomi ke jenjang yang lebih modern seperti contohnya sektor pertanian ke sektor industri manufaktur maupun sektor jasa lainnya yang tangguh. Pendekatan strutur seperti ini seing dengan dengan pola-pola pemnbangunan (patterns development) (Todaro, 2003). Permasalah pokok dalam pembangunan daerah terdapat pada kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah (Arsyad, 2005). Pencapaian pertumbuhan perekonomian daerah terdapat pada acuan pertumbuhan (growth poles) dalam mendorong pertumbuhan wilayah sekitar. Daerah tertentu biasanya mengalami kesulitan dalam mengembangkan jika disamakan dengan wilayah lainnya. Pusat pertumbuhan memerlukan dorongan pertumbuhan wilayah sekitarnya (Rasyid, 2016). Secara umum sektor yang masuk ke dalam sektor unggulan seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan dengan potensi dan kontribusi besar dalam beberapa wilayah (Saputri dan Boedi, 2015). Upaya mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan mulai dari wilayah terkecil di setiap daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah haruslah terlebih dahulu mengetahui komoditas unggulan di daerahnya. Komoditas unggulan diharapkan mampu bersaing secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama dari wilayah lain baik di pasar lokal, nasional maupun global (Hamsir, 2019). Perhitungan metode LQ dan shift share

dapat menentukan gabungan (overlay) dengan penilaian dalam dua hal yaitu angka bertanda positif dan negatif. Identifikasi overlay tersebut jika ketiganya positif (+++) maka dikatakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan (Wahyuningtyas dkk, 2013).

Proses dimana pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ada dan membantu kemitraan antara daerah dengan swasta dalam pembukaan lapangan pekerjaan dalam tujuan merangsang pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (Way, 2019). Sektor basis dan sektor non basis adalah pecahan dari teori struktur perekonomian daerah. Sektor basis terkait sektor ekonomi yang mengekspor barang sedangkan sektor non basis menyediakan barang kebutuhan daerah tersebut. Sektor unggulan merupakan sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun luar daerah itu sendiri. Ini berarti daerah secara tak langsung mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain. Sementara sektor non unggulan adalah sektor atau kegiatan yang hanya mampu melayani pasar di daerah itu sendiri (Soleh dan Maryoni, 2017)

Aktivitas ekonomi dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu basis dan non basis. Namun ketika membahas hal basis maka tentunya pembahasan akan lebih dalam mengenai gerakan pertumbuhan daerah tersebut. Pengukuran sektor basis biasanya diukur dengan menggunakan Analisis Location Quotient (LQ) dapat mengukur dan menunjukkan sektor basis dan bukan basis (Tarigan, 2015). Sektor yang menjadi pokok dari perekonomian dikarenakan memiliki keunggulan dan keuntungan kompetitif yang tinggi sering dikaitkan dengan sektor unggulan (basis). Sedangkan sektor non basis erat kaitannya dengan sektor yang kurang potensial namun tetap memiliki fungsi sebagai sektor penunjang basis. Penentuan sektor unggulan suatu wilayah dilihat dari kontribusi nilai tambah sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian dapat diketahui secara jelas output agregat pada setiap tahun berjalan (Kiha dan Korbaffo, 2019).

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Tentunya dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur data angka yang bertujuan menjawab permasalahan dalam penelitian. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data time series yang digunakan merupakan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Sumber data yang digunakan berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) dari masing masing kabupaten yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan kedua lokasi tersebut merupakan kabupaten penyangga dari Kota Surakarta sehingga dimungkinkan terjadi pergerakan ekonomi pada beberapa sektor. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *location quotient* (LQ) dan analisis *shift share*. Metode *location quotient* merupakan metode yang diperuntukkan untuk melihat sumbangsih relatif dari penambahan suatu sektor daerah terhadap sumbangsihnya pada skala di atasnya baik provinsi maupun nasional. Teknik ini pada dasarnya untuk identifikasi sektor potensi internal mana saja yang dimiliki oleh daerah tersebut kemudian membaginya ke dalam dua bagian yaitu basis dan non basis. Analisis ini digunakan untuk merumuskan pergeseran sektor basis wilayah yang didasarkan pada data PDRB sebagai indikator nilai tumbuh wilayah. Perhitungan LQ ini menyimpulkan dua bagian yaitu

- a. Sektor basis atau spesialisasi wilayah jika nilai LQ lebih dari satu
- b. Sektor non basis jika LQ kurang dari satu
- c. Jika LQ bernilai satu maka tingkat spesialisasi di kabupaten sama dengan tingkat propinsi.

Analisis *shift share* diperuntukkan untuk melihat terjadinya perubahan struktur ekonomi daerah kemudian membandingkannya dengan perekonomian ditingkat nasional. Analisis ini untuk melihat kinerja dan produktifitas kerja ekonomi daerah dengan tingkat atasnya. Analisis ini memberikan kinerja yang diperlihatkan dalam tiga bidang yaitu Komponen Pertumbuhan Nasional (KPN), Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP)

dan KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangs Wilayah).

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Jika melihat hasil penelitian menggunakan analisis LQ maka dapat diidentifikasi beberapa sektor yang termasuk basis maupun non basis pada Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar selama lima tahun terakhir cukup memiliki dominasi rata-rata 7 sektor basis. Tujuh sektor yang dimaksud adalah industri pengolahan, industri listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, penyediaan

akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, real estate dan jasa pendidikan. Hal tersebut menjadikan sektor basis dikarenakan ketujuh sektor tersebut memiliki nilai LQ di atas satu. Sebenarnya sektor pertanian Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing juga memiliki nilai LQ di atas satu pada tahun 2018 sehingga sebenarnya sektor ini juga masih menjadi potensi sebagai sektor basis. Maksud dari sektor basis merupakan sektor tersebut tidak hanya mencukupi kebutuhan daerah namun bisa mengekspor sebagai peruntukkan luar daerah. Berikut ini adalah perhitungan LQ Kabupaten Karanganyar yang dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.** Hasil Analisis LQ Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	0,98	0,98	1,01	0,98	0,99
B	pertambangan dan Penggalian	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46
C	Industri Pengolahan	1,30	1,32	1,35	1,36	1,40
D	Pengadaan Listrik dan gas	1,59	1,59	1,58	1,60	1,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,15	1,14	1,15	1,16	1,13
F	Konstruksi	0,63	0,64	0,66	0,67	0,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,84	0,84	0,84	0,85	0,85
H	Transportasi dan pergudangan	0,86	0,09	0,83	0,81	0,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,04	1,03	1,02	1,02	1,04
J	Informasi dan Komunikasi	0,36	0,35	0,27	0,36	0,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,22	1,24	1,26	1,28	0,13
L	Real Estate	1,02	1,01	1,01	1,02	1,01
M,N	Jasa Perusahaan	0,96	0,98	0,99	0,81	0,96
O	Administrasi Pemerintahan, Petahanan, Jaminan Sosial Wajib	0,75	0,75	0,74	0,73	0,72
P	Jasa Pendidikan	1,03	1,03	1,01	1,00	1,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	0,97	0,96	0,95	0,95	1,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,94	0,87	0,92	0,93	0,96

Sumber : Data Sekunder (2021) Diolah

Berdasarkan tabel 1 dapat kita ketahui bahwa sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan gas, dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan sektor basis dengan rerata nilai LQ dari tahun 2016 hingga tahun 2020 lebih dari 1. Contohnya saja rerata dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sektor industri pengolahan menyumbangkan 11355 milyar rupiah di setiap tahunnya dan

mengalami peningkatan terus menerus hingga sektor 2019. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa sektor ini memiliki daya saing yang baik. sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor real estate juga merupakan sektor basis dikarenakan memiliki nilai rerata LQ lebih dari satu. Hal ini dikarenakan Kabupaten Karanganyar merupakan daerah pengembangan sehingga banyak sekali pembangunan khususnya peruntukkan real

estate sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi adanya jasa keuangan dan asuransi yang ikut menguat. Tentunya penguatan sektor ini harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk pengembangannya sehingga semua strategi yang dilakukan juga harus berujung pada kesejahteraan rakyat yang merupakan

Kesejahteraan dipandang sebagai keadaan yang lebih baik (Nurrohman dan Qurniawati, 2018). Sektor jasa pendidikan juga turut andil memberikan kontribusi bagi daerah Kabupaten Karanganyar karena juga merupakan sektor basis yang memiliki nilai rerata LQ lebih dari satu.

**Tabel 2.** Hasil Shift Share Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020

Sektor	KPN (Komponen Pertumbuhan Nasional)	KPP (Komponen Pertumbuhan Proporsional)	KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah)	Pertumbuhan Ekonomi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	13,72392	(7,82303)	2,95862	8,85950
pertambangan dan Penggalian	13,72392	(3,30616)	(5,13321)	5,28455
Industri Pengolahan	13,72392	(3,51838)	7,74820	17,95374
Pengadaan Listrik dan gas	13,72392	5,306149	(3,64546)	15,38462
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,72392	5,504303	(2,56156)	16,66667
Konstruksi	13,72392	2,915727	4,10317	20,74282
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,72392	0,42347	1,62840	15,77580
Transportasi dan pergudangan	13,72392	(30,8115)	7,99667	(9,09091)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,72392	1,821442	(0,53854)	15,00682
Informasi dan Komunikasi	13,72392	50,61576	(0,13850)	64,20118
Jasa Keuangan dan Asuransi	13,72392	1,314187	(103,00107)	(87,96296)
Real Estate	13,72392	4,586873	(0,74639)	17,56440
Jasa Perusahaan	13,72392	8,754272	(0,40027)	22,07792
Administrasi Pemerintahan, Petahanan, Jaminan Sosial Wajib	13,72392	(4,97792)	(3,85711)	4,88889
Jasa Pendidikan	13,72392	10,00138	(3,14051)	20,58480
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	13,72392	22,71392	4,01160	40,44944
Jasa Lainnya	13,72392	5,897701	2,43276	22,05438

Sumber : Data Sekunder (2021) Diolah

Tabel 2 mengindikasikan adanya nilai positif dan negatif pada analisis hasil shift share Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2020. Maksud dari nilai positif menunjukkan pada daerah Kabupaten Karanganyar terdapat spesialisasi sektor yang memperlihatkan penumbuhan yang cepat pada Provinsi Jawa Tengah. Namun masih juga terdapat nilai negatif dimana nilai tersebut mengindikasikan bahwa spesialisasi sama dengan tingkat atasnya dan tumbuh lambat. Pada tabel 2

menunjukkan bahwa nilai KPP yang memiliki angka positif terdapat pada 12 sektor dan sisanya berada pada nilai proporsional negatif. Berdasarkan tabel 2 dapat juga dilihat nilai Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah pada Kabupaten Karanganyar. Hasil analisis juga menunjukkan nilai positif maupun negatif. Indikasi dari nilai positif tersebut memperlihatkan bahwa sektor ekonomi di Kabupaten Karanganyar dapat tumbuh dengan tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan

tingkat atasnya yaitu tingkat provinsi. Namun jika terdapat sektor yang masih bernilai negatif maka sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama pada Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tujuh sektor yang bernilai positif sehingga sektor tersebut memiliki potensi dan daya saing dan diprediksi

mampu tumbuh cepat. Beberapa sektor yang dimaksud adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa kesehatan dan sektor jasa lainnya.

**Tabel 3.** Hasil Analisis LQ Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	0,67	0,67	0,67	0,65	0,62
B	pertambangan dan Penggalian	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17
C	Industri Pengolahan	1,10	1,11	1,13	1,14	1,26
D	Pengadaan Listrik dan gas	1,21	1,22	1,21	1,20	1,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,54	0,55	0,55	0,55	0,57
F	Konstruksi	0,63	0,62	0,62	0,63	0,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,31	1,29	1,28	1,27	1,21
H	Transportasi dan pergudangan	1,06	0,11	1,08	1,07	1,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,19	1,16	1,15	1,34
J	Informasi dan Komunikasi	1,25	1,21	1,19	1,18	1,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,26	1,31	1,31	1,32	1,34
L	Real Estate	1,30	1,31	1,34	1,35	1,44
M,N	Jasa Perusahaan	1,03	1,03	1,02	1,00	1,18
O	Administrasi Pemerintahan, Petahanan, Jaminan Sosial Wajib	0,84	0,85	0,84	0,85	0,89
P	Jasa Pendidikan	0,94	0,95	0,94	0,94	1,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1,09	1,08	1,07	1,08	1,08
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,90	0,87	0,85	0,85	1,01

Sumber : Data Sekunder (2021) Diolah

Tabel 3 memperlihatkan bahwa terdapat 9 sektor yang termasuk dalam kategori sektor basis sedangkan masih terdapat juga sektor yang masuk non basis. Penggunaan nilai rerata LQ dalam menyimpulkan nilai sektor basis dan non basis dilakukan untuk menghindari nilai bias dalam perhitungan LQ. Sektor industri pengolahan dan sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor basis dengan rerata nilai LQ sebesar 1,15 dan 1,22. Sementara itu sektor basis selanjutnya pada daerah Kabupaten Sukoharjo adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan sektor informasi dan komunikasi yang masing-masing memiliki rerata nilai LQ sebesar 1,27 ; 1,2 ; dan 1,19. Sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, dan sektor perusahaan juga merupakan sektor basis yang

memiliki nilai rerata LQ lebih dari 1. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sukoharjo merupakan penyangga sehingga daerah ini juga berkembang secara pesat bahkan terdapat daerah yang dinamakan sebagai Solo baru dikarenakan dekat dengan daerah Kota Surakarta sehingga perkembangan sektor real estate, perusahaan, jasa keuangan dan asuransi juga berkembang secara pesat. Sektor jasa kesehatan juga merupakan sektor basis pada daerah ini dikarenakan memiliki nilai rerata LQ sebesar 1,08. Setelah diketahui sektor basis pada daerah Kabupaten Sukoharjo harapannya pemerintah daerah dapat berpusat pada sektor tersebut dan mempertahankan sektor tersebut dikarenakan memiliki daya saing yang baik. Setelah melakukan analisis tersebut maka diperlukan analisis tambahan yaitu analisis shift share untuk mengetahui peran

perekonomian dan pergeserannya yang dapat dilihat pada table berikut ini.

**Tabel 4.** Hasil Shift Share Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Sektor	KPN (Komponen Pertumbuhan Nasional)	KPP (Komponen Pertumbuhan Proporsional)	KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah)	Pertumbuhan Ekonomi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	13,72392	(7,82303)	1,9498	7,8507
pertambangan dan Penggalian	13,72392	(3,30616)	(10,4069)	0,0109
Industri Pengolahan	13,72392	(3,51838)	15,6578	25,8634
Pengadaan Listrik dan gas	13,72392	5,306149	2,3163	21,3464
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,72392	5,504303	5,8943	25,1225
Konstruksi	13,72392	2,915727	11,2195	27,8592
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,72392	0,42347	(8,2229)	5,9245
Transportasi dan pergudangan	13,72392	(30,8115)	51,0445	33,9569
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,72392	1,821442	15,1196	30,6650
Informasi dan Komunikasi	13,72392	50,61576	(16,6375)	47,7022
Jasa Keuangan dan Asuransi	13,72392	1,314187	6,7117	21,7498
Real Estate	13,72392	4,586873	12,8182	31,1290
Jasa Perusahaan	13,72392	8,754272	17,2821	39,7603
Administrasi Pemerintahan, Petahanan, Jaminan Sosial Wajib	13,72392	(4,97792)	7,0147	15,7607
Jasa Pendidikan	13,72392	10,00138	9,6380	33,3633
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	13,72392	22,71392	(1,2241)	35,2137
Jasa Lainnya	13,72392	5,897701	14,8138	34,4354

Sumber : Data Sekunder (2021) Diolah

Tabel 4 mengindikasikan adanya nilai positif dan negatif pada analisis hasil shift share Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020. Maksud dari nilai positif menunjukkan pada daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat spesialisasi sektor yang memperlihatkan penumbuhan yang cepat pada Provinsi Jawa Tengah. Namun masih juga terdapat nilai negatif dimana nilai tersebut mengindikasikan bahwa spesialisasi sama dengan tingkat atasnya dan tumbuh lambat. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai KPP yang memiliki angka positif terdapat pada 12 sektor dan sisanya berada pada nilai proporsional negatif. Berdasarkan tabel 4 dapat juga dilihat nilai Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah pada Kabupaten Sukoharjo. Hasil analisis juga menunjukkan nilai positif maupun negatif.

Indikasi dari nilai positif tersebut memperlihatkan bahwa sektor ekonomi di Kabupaten Sukoharjo dapat tumbuh dengan tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat atasnya yaitu tingkat provinsi. Namun jika terdapat sektor yang masih bernilai negatif maka sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama pada Provinsi Jawa Tengah. Terdapat empat sektor yang bernilai negatif sedangkan sisanya bernilai positif sehingga sektor bernilai positif tersebut memiliki potensi dan daya saing dan diprediksi mampu tumbuh cepat. Beberapa sektor yang memiliki nilai negatif adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa kesehatan.



## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat sektor basis yang terdapat pada dua daerah kabupaten penyangga yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian berdasarkan analisis LQ menyatakan bahwa terdapat 7 sektor basis pada daerah Kabupaten Karanganyar sedangkan pada daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat 9 sektor basis. Jika melihat analisis *shift share* dengan indikator pada penilaian komponen pertumbuhan pangsa wilayah pada Kabupaten Karanganyar terdapat 7 sektor yang bernilai positif sedangkan pada Kabupaten Sukoharjo hanya terdapat 4 sektor yang masih bernilai negatif. Seharusnya masing-masing pemerintah daerah harus berkonsentrasi pada sektor basis dikarenakan sektor tersebut memiliki daya saing dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah tersebut.

## 6. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan Hibah Penelitian Dosen Pemula. Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih pada LPPM Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah memberikan izin penelitian serta kepada banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan naskah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincoln, 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE.

Basuki, M. Mujiraharji, FN. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*. 15 (1)..52 – 60

Hajeri. Yurisinthae, E. Dolorosa, E. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. 4 (2). 253-269.

Hamsir, HM. Hadayani. Lamusa, A. 2019. Analisis Komoditas Basis Sub Sektor Tanaman Pangan Di Kecamatan Buko

Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

*Jurnal Agroland*. 26 (1). 76-85.

- Kiha, EK. Korbaffo, YA. 2019. Analisis Sektor Unggulan Dan Strategi Pengembangannya Dalam Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kabupaten Timor Tengah Utara (Ttu). *Jurnal AKRAB JUARA*. 4 (4). 43-57.
- Kurniawan, B. (2016). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*. 4 (1). 1-26.
- Mubarok, F. (2019). Analisis Sektor Basis Di Kabupaten Sampang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. 2 (1). 145-149.
- Nurrohman, Y.A, Qurniawati, RS. Hasyim, F. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Jurnal Magisma*. 7 (1). 35-43.
- Rasyid, A. (2016). Analisis Potensi Sektor Potensi Pertanian Di Kabupaten Kediri Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 99–111.
- Rini, OSP. Khoirudin, R. (2020). Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 17 (1). 15-23
- Sapriadi. Hasbiullah. 2015. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba. *Iqtisaduna*. 1 (1). 71-86.
- Saputri, I. Boedi, A. 2018. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 2 (2). 217-229
- Sari, SR. (2018). Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Struktur Ekonomi Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. *Jurnal Agriseip*. 17 (2). 175-186.
- Soleh, A. Maryoni, HS. 2017. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Dan Hubungannya Dengan Kesempatan Kerja Dan Investasi Di Kabupaten Batanghari. *Jurnal EKONOMI-Qu*. 7 (1). 15-30.
- Tamura, R., Dwyer, J., Devereux, J., & Baier, S. (2019). Economic growth in the long run. *Journal of Development Economics*, 137(October 2018), 1–35. <https://doi.org/10.1016/j.jdevec.2018.10.010>

- Tarigan, R. (2015). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Bumi Aksara. Jak.
- Todaro, P Michael dan Smith, C Stephen, 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development (11th ed.)*. In *Economic Development (11th ed.)*. Retrieved from <https://bok.cc/book/1183021/c59931> Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2020.
- Usman. (2015). *Analisis Sektor Basis Dan Subsektor Basis Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua*. JSEP. 8 (3). 38-49.
- Wahyuningtyas, R., Rusgiyono, A., & Wilandari, Y. (2013). *Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB : Studi kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006- 2010*. *Jurnal Gaussian*, 2(3), 219-228.
- Way, E., Engka, D. S. M., & Siwu, H. F. D. (2019). *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Sorong Selatan*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(2), 35–48.